BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama 189 negara anggota menyepakati *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai agenda pembangunan global, memuat delapan tujuan utama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia dengan target pencapaian pada tahun 2015 (Dwiastuti et al., 2022). Agenda pembangunan global setelah berakhirnya *Millennium Development Goals* (MDGs) kemudian dirumuskan dalam kerangka baru yang dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep SDGs dikembangkan sebagai kelanjutan agenda pembangunan global yang mampu menyesuaikan berbagai perubahan yang terjadi setelah tahun 2015 (Sutopo et al., 2014).

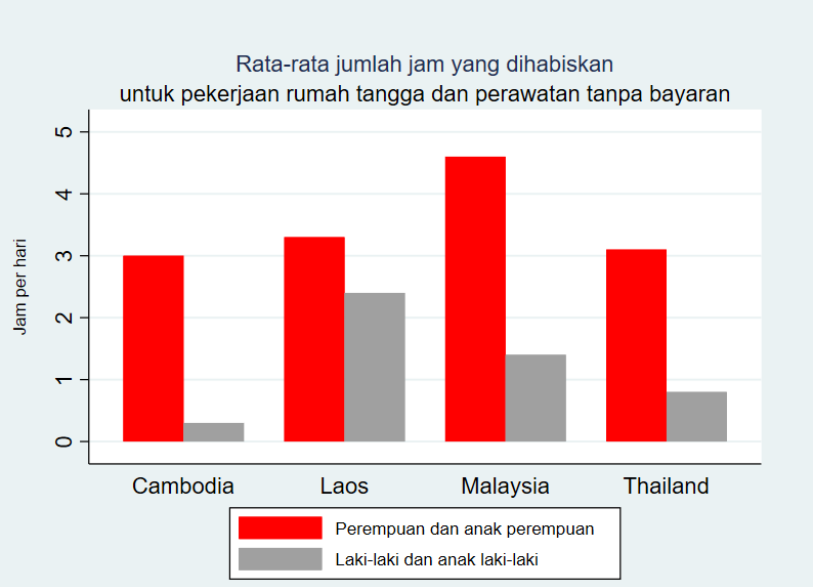
Prinsip dasar dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah *no one left behind*, yang berarti bahwa pembangunan harus bersifat inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi atau pengecualian. Pembangunan inklusif bukan hanya mengenai peningkatan PDB, tetapi juga tentang siapa yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut (Ranieri & Ramos, 2013). Tujuan utamanya adalah menciptakan kesetaraan dalam kesempatan dan hasil, serta memperkuat partisipasi aktif seluruh warga dalam proses pembangunan. Lebih jauh, pembangunan inklusif juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan dalam kerangka SDGs didefinisikan sebagai pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (Keeble, 1988). Pembangunan yang hanya fokus pada aspek ekonomi tanpa memperhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan berisiko memperlebar ketimpangan dan merusak daya dukung ekosistem. Oleh karena itu, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dipandang sebagai dua dimensi yang saling melengkapi dan esensial dalam implementasi Agenda 2030.

Salah satu pilar kunci dalam pembangunan inklusif dan berkelanjutan adalah kesetaraan gender, sebagaimana tercermin dalam SDGs Tujuan 5: *Achieve gender equality and empower all women and girls*. Kesetaraan gender merupakan konsep yang menekankan adanya keseimbangan dan kesetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan sebagai sesama manusia (Akmaliyah, 2021). Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan persamaan hak, tetapi juga mencakup kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, dan partisipasi sosial. UN Women (2020) menegaskan bahwa kesetaraan gender tidak hanya merupakan hak asasi manusia, tetapi juga prasyarat untuk mewujudkan dunia yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong kesetaraan gender dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan mengurangi berbagai bentuk ketimpangan dalam masyarakat.

Meskipun demikian, hingga saat ini masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Negara-

negara anggota ASEAN menunjukkan capaian yang beragam dalam hal pemberdayaan perempuan. Laporan *ASEAN Gender Outlook* (2024) menunjukkan bahwa secara umum telah terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan politik. Misalnya, partisipasi perempuan di parlemen nasional mencapai rekor tertinggi sebesar 23 persen pada tahun 2023, dan beberapa negara seperti Timor-Leste dan Filipina mencatat kemajuan signifikan. Namun, di sisi lain, berbagai permasalahan struktural masih menghambat tercapainya kesetaraan gender yang sesungguhnya. Perempuan di ASEAN masih menghadapi beban kerja domestik dua kali lebih besar dibanding laki-laki dan dominasi dalam pekerjaan informal.



Sumber: ASEAN & UN Women, 2024 (diolah)

Gambar 1. 1. Rata-rata jam kerja domestik tanpa bayaran di ASEAN

Grafik tersebut menunjukkan rata-rata jumlah jam yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan tanpa bayaran di beberapa negara ASEAN. Pekerjaan ini mencakup berbagai aktivitas seperti memberi makan, membersihkan,

mendidik, mengawasi, memasak, berbelanja untuk keluarga, serta berbagai tugas rumah tangga lainnya yang dilakukan setiap hari. Data penggunaan waktu di kawasan ASEAN menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan tersebut dilakukan oleh perempuan dan anak perempuan. Di semua negara yang ditampilkan, perempuan umumnya menghabiskan waktu lebih dari dua kali lipat dibandingkan laki-laki dalam melakukan pekerjaan rumah tangga dan perawatan tanpa bayaran. Sebagai contoh, di Malaysia perempuan menghabiskan sekitar lima jam per hari untuk pekerjaan tersebut, sedangkan laki-laki hanya sekitar satu jam, sementara di Kamboja perempuan menghabiskan sekitar tiga jam per hari dan laki-laki kurang dari setengah jam.

Selain kesenjangan dalam partisipasi ekonomi dan kesempatan kerja, perempuan di ASEAN juga masih menghadapi kesulitan mengakses layanan kesehatan, dan kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender. Hampir 1 dari 10 perempuan mengalami kekerasan oleh pasangan, dan jumlah korban yang mencari bantuan terus menurun. Selain itu, kepemilikan aset dan lahan pertanian oleh perempuan masih sangat terbatas, memperlemah ketahanan ekonomi mereka di tengah krisis. Realitas ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di ASEAN belum sepenuhnya tercapai, meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Kesenjangan partisipasi ekonomi, beban kerja tidak dibayar, dan keterbatasan dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa tantangan gender masih melekat pada dimensi sosial dan ekonomi kawasan.

Permasalahan tersebut menjadi tantangan penting khususnya dalam konteks pembangunan dan persaingan global bagi negara-negara ASEAN. Karena kualitas

sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi. Tenaga kerja yang kompetitif tidak hanya ditentukan oleh keterampilan dan produktivitas, tetapi juga kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia yang berperspektif gender menjadi salah satu modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang kompetitif secara global. Sumber daya manusia yang unggul tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap keadilan gender sehingga setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi tanpa dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin (Lestari, 2015).

Alekhina dan Ganelli (2020) menegaskan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan (*Female Labor Force Participation*/FLFP) merupakan pendorong penting bagi pertumbuhan yang inklusif. Penelitian ini menemukan bahwa jika tingkat partisipasi perempuan di angkatan kerja setara dengan laki-laki, perekonomian akan lebih tangguh dan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi. Namun, tingkat FLFP di beberapa negara ASEAN masih jauh lebih rendah dari rata-rata Asia Timur dan Pasifik. Kesenjangan yang lebih tinggi dalam partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan pendapatan antar jenis kelamin, yang pada gilirannya menciptakan ketimpangan pendapatan secara keseluruhan. Hasil empiris dari studi ini mengkonfirmasi bahwa peningkatan FLFP berkontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif, baik melalui peningkatan pendapatan per kapita maupun melalui peningkatan indeks ekuitas.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis partisipasi perempuan dalam dunia kerja serta kaitannya dengan ketimpangan pendapatan di negara-negara ASEAN. Topik ini dipilih untuk memberikan kontribusi empiris dalam menyoroti peran perempuan dalam pembangunan inklusif serta urgensi penyusunan kebijakan berbasis gender dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan ukuran ketimpangan pendapatan secara agregat, penelitian ini menganalisis ketimpangan berdasarkan kelompok distribusi pendapatan masyarakat sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai dinamika ketimpangan pada tiap kelompok. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan beberapa variabel yang merepresentasikan posisi perempuan dalam pembangunan, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai variabel utama, serta rata-rata lama sekolah, proporsi perempuan di parlemen, dan indeks demokrasi sebagai variabel pendukung untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh faktor gender terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan ASEAN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah di susun dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah pengaruh kesetaraan gender terhadap ketimpangan pendapatan di 9 negara ASEAN tahun 2016-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak di capai adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesetaraan gender terhadap ketimpangan pendapatan di 9 negara Asean tahun 2016-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan ketimpangan pendapatan.
2) Peneliti, sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh kesetaraan gender terhadap ketimpangan pendapatan.
3) Pembaca, sebagai sumber informasi dan wawasan untuk memahami isu kesetaraan gender serta kaitannya dengan ketimpangan pendapatan.

1.5 Hipotesis Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah

Diduga bahwa kesetaraan gender berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 9 negara ASEAN tahun 2016-2023.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Penjelasan sistematika penulisan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang relevan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, variabel dan definisi operasional, metode analisis data serta lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan temuan penelitian, analisis hasil, interpretasi data, serta pembahasan yang menghubungkan temuan dengan teori dan penelitian sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan penelitian, keterbatasan studi dan saran untuk penelitian maupun kebijakan di masa depan.